



Parpol Deklarasi Damai, Ciptakan Pemilu Kondusif

JOGJA - Sebanyak 12 partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 di Kota Jogja siap mengutamakan kedamaian. Itu terungkap dalam Deklarasi Damai Jelang Pemilu 2014 di Balai Kota Jogja kemarin (31/12).

Deklarasi itu dihadiri Wakil Wali Kota Jogja Imam Priyono, Ketua KPU Kota Jogja



Wawan Budianto, Ketua Panwaslu Kota Jogja Agus Triyatno, dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Jogja Sukamto. Deklarasi itu merupakan bentuk komitmen bersama mewujudkan pemilu yang bersih, kondusif, dan bebas dari segala bentuk kecurangan.

► *Baca Parpol... Hal 7*



HUMAS PEMKOT JOGJA FOR RADAR JOGJA

TENTERAM: Perwakilan partai politik menandatangani komitmen dalam Deklarasi Damai Jelang Pemilu 2014 di Balai Kota Jogja kemarin (31/12).

Dana Kampanye Perlu Sertakan Rekening

■ PARPOL...

Sumbangan dari hal 1

Dalam pelaksanaan deklarasi ini, Pemkot Jogja menjadi fasilitator. Menurut Imam Priyono, hal itu bertujuan menciptakan pemilu yang aman dan tertib.

Selain itu, lanjutnya, deklarasi dilakukan agar pemilu dapat berjalan sesuai kehendak masyarakat Kota Jogja.

Dengan demikian, pesta demokrasi mampu melahirkan pemimpin yang membawa perubahan demi kesejahteraan masyarakat. "Sesuai regulasi maka Pemkot Jogja memfasilitasi deklarasi ini. Dimulai dari Kota Jogja, semoga bangunan demokrasi mampu mencerminkan hal-hal yang baik dan dapat memberikan contoh di daerah lainnya," kata IP di sela deklarasi.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto menjelaskan, deklarasi ini merupakan bentuk ekspektasi tinggi masyarakat Kota Jogja agar pemilu berjalan dengan baik. Selain itu, pelaksanaan pemilu tidak merusak kondusivitas Kota Jogja.

"Memberikan warna politik yang lebih bagus. Itu baik dalam politik lokal maupun tingkat nasional," kata Wawan.

Saat disinggung mengenai laporan sumbangan dana kampanye, Wawan menyatakan, KPU hanya bertugas menerima dan mengevaluasi lembar laporan sumbangan dana kampanye masing-masing parpol. Artinya, KPU tidak bisa menjustifikasi bilamana parpol sama sekali tidak memiliki sumbangan dana kampanye. Itu seperti yang dilakukan Partai Golkar di mana mennerangkan sumbangan dana kampanye mereka berjumlah nol rupiah.

KPU akan mengumumkan dana kampanye itu ke masyarakat. Sedangkan terkait keuangan parpol bakal dilakukan audit oleh kantor akuntan publik (KAP) untuk mengetahui validitas dan sumber dana yang diberikan kepada parpol.

"Sementara ini *kan* yang masuk baru laporan sumbangan dana kampanye. Tentunya ada penilaian yang lebih mendetail dari pihak ketiga, dalam hal ini dilakukan KAP," imbuhnya.

Ketua Panwaslu Kota Jogja Agus Triyatno menuturkan, deklarasi ini diharapkan memberikan pemahaman kepada seluruh peserta pemilu agar menaati segala peraturan. Sebab, selama ini lembaga yang mengawasi

pemilu kerap menemukan pelanggaran.

Pelanggaran yang banyak terjadi berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK). "Pelanggaran APK sama saja merusak keharmonisan pemilu. Jangan sampai deklarasi ini tidak ada implementasinya untuk mewujudkan pemilu yang bersih," tegasnya.

Terkait pelanggaran APK, dia menegaskan, selama ini ada beberapa temuan pelanggaran. Panwaslu mendapat rekomendasi dari KPU untuk segera menertibkan.

Pelanggaran itu mengarah pada sanksi administrasi. "Mengenai pelanggaran pidana pemilu, panwaslu tidak bisa mengumpulkan bukti-bukti kuat sehingga investigasi tidak bisa diteruskan," jelasnya.

Agus juga sempat mengomentari laporan sumbangan dana kampanye parpol yang jumlahnya nol rupiah. Menurutnya, berapa pun jumlah sumbangan dana kampanye perlu disertakan dalam laporan. Hal itu agar tidak menimbulkan pertanyaan dari publik. "Masak rekening tidak ada jumlah minimalnya. Itu yang patut dipertanyakan," imbuhnya. (fid/amd/nn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005